

# ANALISIS KEPEMIMPINAN KEPALA DESA DALAM PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN DESA BANARAN

**Dyan Septi Aning Dita**

Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya

[dyandita@mhs.unesa.ac.id](mailto:dyandita@mhs.unesa.ac.id)

**Dr. Sugeng Harianto, M.Si**

Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya

[sugengharianto@unesa.ac.id](mailto:sugengharianto@unesa.ac.id)

## ABSTRAK

Sebagai orang nomor satu dalam struktur pemerintahan desa, kepala desa memiliki tugas dan fungsi menyeluruh. Tugas dan fungsi kepala desa termuat dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa. Diantaranya menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa. Banaran merupakan salah satu contoh desa yang diketahui berhasil dalam pembangunan fisiknya. Keberhasilan pembangunan tidak lepas dari peran kepala desa. Keberhasilan kepala desa mengantarkan kepala desa terpilih kembali untuk ketiga kalinya pada pilkades mendatang. Penelitian ini bertujuan mengkaji bagaimana kepemimpinan dan legitimasi kepala desa dalam penyelenggaraan pembangunan. Selain itu, melihat respon masyarakat terhadap kepemimpinan kepala desa. Untuk menjawab tujuan tersebut, penelitian ini menggunakan perspektif teori Max Weber dan Robert K. Merton, dimana Weber dan Merton membagi kepemimpinan menjadi beberapa pola kepemimpinan. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan menjabarkan fenomena yang terjadi di Desa Banaran. Peneliti melakukan pendekatan melalui proses *getting in* dengan pemerintahan desa serta masyarakat sebelum melakukan penelitian. Pengambilan data dilakukan dengan *participant observar*, wawancara mendalam dan dokumentasi, dibantu dengan sumber – sumber referensi. Teknik analisis data yang digunakan adalah model Miles dan Huberman (dalam Emzir, 2010 : 129). Langkah – langkah analisis data kualitatif yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil yang didapat dalam penelitian ini adalah pola kepemimpinan kepala desa yang melibatkan masyarakat dalam program kerjanya. Kepala desa juga menjalankan agenda pembangunan yang berfokus pada kesejahteraan masyarakat. Respon positif yang di dapat kepala desa pun tinggi. Tingkat partisipasi yang tinggi mengindikasikan legitimasi yang tinggi pula dari masyarakat.

Kata kunci : Pembangunan, leadership, polymorphic leadership, partisipasi masyarakat

## ABSTRACT

As the number one person in the village government structure, the village head has overall duties and functions. The duties and functions of the village head are contained in Law no. 6 of 2014 concerning the village. Among them are organizing village government, carrying out development, community development, and empowering village communities. Banaran is an example of a village that is known to be successful in its physical development. The success of development cannot be separated from the role of the village head. The success of the village head has led the village head to be re-elected for the third time in the upcoming pilkades. This

study aims to examine how the leadership and legitimacy of the village head in implementing development. In addition, seeing the community's response to the leadership of the village head. To answer this objective, this study uses the perspective of Max Weber and Robert K. Merton theory, where Weber and Merton divide leadership into several leadership patterns. The method used is qualitative by describing the phenomena that occur in Banaran Village. The researcher made an approach through the getting in process with the village government and the community before conducting the research. Data were collected by participant observers, in-depth interviews and documentation, assisted by reference sources. The data analysis technique used was the Miles and Huberman model (in Emzir, 2010: 129). The steps of qualitative data analysis are data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results obtained in this study are the leadership patterns of village heads that involve the community in their work programs. The village head also carries out a development agenda that focuses on community welfare. The positive response received by the village head was high. A high level of participation indicates a high level of legitimacy from the community.

Keywords : Development, leadership, polymorphic leadership, community participation

## **PENDAHULUAN**

Pembangunan merupakan salah satu bentuk perubahan sosial yang terarah serta terencana melalui berbagai macam kebijakan. Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, dijelaskan bahwa tujuan dari dilaksanakannya pembangunan yaitu untuk mensejahterakan masyarakat. Selain itu, meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pembangunan infrastruktur desa, pengembangan pada potensi ekonomi pertanian berskala produktif, pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan, dll. Seperti yang tertera pada pasal 78 ayat (3), dalam pelaksanaan pembangunan desa penting kiranya untuk mengedepankan sikap gotong royong, kekeluargaan, serta kebersamaan guna mewujudkan rasa keadilan dan perdamaian. Tidak hanya itu, tetapi juga menjadikan desa semakin maju, kuat, mandiri, dan juga demokratis.

Pelaksanaan pembangunan desa tidak hanya ditujukan untuk masyarakat semata, melainkan harus ada panduan serta bimbingan dari pemerintah setempat. Apalagi jika posisi desa terletak jauh dari jangkauan pemerintahan kabupaten. Oleh karena itu, perlu adanya pendampingan dari pemerintahan pusat. Pembangunan tersebut dimulai dari perencanaan pembangunan sampai pembangunan itu berhasil dikerjakan. Tahapan dalam pembangunan desa yang terdapat dalam pasal 78, yaitu melakukan perencanaan pembangunan secara berjangka melalui kegiatan musrenbang, melaksanakan pembangunan desa, melakukan pemantauan serta pengawasan pembangunan yang telah berlangsung.

UU No. 6 Tahun 2014 tidak hanya mengatur tentang desa saja tetapi juga mengatur tentang pemimpin desa. Peran dan tugas kepala desa merupakan salah satu hal yang diatur dalam undang – undang. Peran dan tugas kepala desa yaitu menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, pemberdayaan masyarakat desa (Chabib Suraya, 2017). Tidak hanya itu saja, kepala desa juga bertanggung jawab atas rancangan pengajuan pembangunan desa, termasuk mengajukan rancangan peraturan desa. Rancangan tersebut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD) untuk dibahas dan ditetapkan bersama anggota BPD, dalam merealisasikan pembangunan yang dilakukan. Kepala desa juga wajib melaksanakan pemantauan akan kinerja tenaga kerja. Hal tersebut dilakukan agar hasil yang didapatkan dari pembangunan tersebut mencapai maksimal. Serta dapat dipergunakan sebagaimana mestinya oleh masyarakat.

Apabila kepala desa tidak menjalankan peran dan tugasnya seperti yang disebutkan, maka kepala desa wajib mendapatkan sanksi administratif. Sanksi tersebut berupa lisan atau teguran. Sanksi tertulis serta bisa menjadi pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan

pemberhentian selamanya. Apabila aturan yang dilanggar kepala desa bersifat berat. Sama halnya dengan yang terjadi pada beberapa desa di Indonesia. Salah satunya yang termuat dalam berita [Metromedianews.co](http://Metromedianews.co). Dalam berita tersebut dijelaskan tentang penyimpangan dana desa dan penyalahgunaan wewenang kepala desa. Pelanggaran itu dilakukan oleh sejumlah desa di Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat. Pada kasus ini, kepala desa dinilai tidak bertanggung jawab atas peran dan tugasnya sebagai pemimpin sesuai yang tertera dalam UU No. 6 Tahun 2014. Dana desa tidak dipergunakan dengan baik, serta pembangunan yang dilakukan desa jauh dari harapan masyarakat.

Jika di Subang Jawa Barat pembangunan serta kepemimpinan kepala desa dinilai berantakan, maka yang terjadi di Desa Banaran pembangunan dan kepemimpinan kepala Desa dinilai sukses. Keikutsertaan kepala desa dalam pembangunan disambut positif oleh masyarakat. Misalnya pada pembangunan drainase, pembangunan RTLH (Rumah Tidak Layak Huni), pembangunan jalan poros, yang dibantu langsung oleh kepala desa. Kepala desa dan perangkat desa menjalankan tugasnya dengan baik sebagai tokoh masyarakat. Oleh sebab itu, pembangunan di Desa Banaran dianggap

berhasil dibandingkan dengan desa lain di Kecamatan Balerejo.

Selain itu, pembangunan di Desa Banaran terlaksana sesuai dengan rencana pembangunan yang sudah ditetapkan bersama. Masyarakat pun secara merata mendapatkan banyak bantuan, baik secara materi maupun sembako dari pemerintahan desa. Tidak hanya itu, banyak pelatihan yang diberikan anggota PKK kepada masyarakat, misalnya pelatihan pembuatan kerajinan tangan seperti bros, dll.

Kepemimpinan demikian yang diinginkan oleh masyarakat, karena dapat membawa perubahan secara nyata pada desa. Masyarakat juga mendorong kepala desa untuk mengajukan diri sebagai kepala desa kembali untuk yang ke-tiga kalinya secara berturut – turut. Fenomena tersebut, sangat jarang terjadi di Kecamatan Balerejo karena kebanyakan kepala desa hanya menjabat selama 2 (dua) periode masa jabatan saja.

Kajian – kajian tentang kepemimpinan dan pembangunan desa sudah banyak dilakukan. Kajian – kajian tersebut antara lain, Patricia Dhiana Paramita. Melakukan penelitian mengenai gaya kepemimpinan (*Style Of Leadership*) yang efektif dalam suatu organisasi. Penelitian yang dilakukan dengan

pendekatan kualitatif ini menemukan jenis – jenis gaya kepemimpinan berdasarkan kepribadian. Diantaranya adalah gaya kepemimpinan karismatik, gaya kepemimpinan otoriter, gaya kepemimpinan demokratis, dan gaya kepemimpinan moralis. Gaya kepemimpinan yang dianggap paling utama ialah pemimpin yang mampu memberikan motivasi bagi seluruh anggotanya.

Arumsari, dkk melakukan penelitian tentang komunikasi politik kepala desa dalam mendorong inovasi pembangunan desa. Penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif ini menemukan salah satu faktor utama dalam menciptakan komunikasi sehari – hari antara kepala desa dengan masyarakat, komunikasi sehari – hari tersebut merupakan komunikasi interpersonal itu sendiri. Media sosial juga berperan penting dalam komunikasi politik kepala desa. Sikap kepala desa yang sesuai dengan budaya setempat juga merupakan poin *plus* yang berdampak positif untuk lebih dekat dengan masyarakat. Hal tersebut dirasa sangat berguna untuk meningkatkan pembangunan desa.

Open Nikolaus melakukan penelitian tentang hubungan antara

kepemimpinan tipe demokratis kepala desa dengan partisipasi masyarakat dalam membangun desa. Penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif ini menemukan, bahwa kepemimpinan kepala desa yang mempunyai sifat demokratis dapat meningkatkan partisipasi dan keikutsertaan masyarakat. Kepala Desa harus bisa mengetahui ciri khas bagaimana kepemimpinan secara demokratis itu sendiri dan mampu menerapkannya di pemerintahan yang sedang dipimpinnya. Agar dapat mempengaruhi kinerjanya selama menjabat.

Deibby K. A Pangkey melakukan penelitian tentang peran kepala desa dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Tateli Satu. Penelitian tersebut menggunakan pendekatan kualitatif. Ditemukan bahwa kepala desa wajib dan bertanggung jawab melakukan pendampingan dalam pembangunan fisik desa. Selain itu, peran kepala desa juga menentukan partisipasi masyarakat dan kerjasama antar perangkat desa, serta kualitas sumber daya aparat desa.

Ardilah, dkk melakukan penelitian mengenai upaya kepala desa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yang

menemukan bahwa dalam meningkatkan keikutsertaan masyarakat di pembangunan, dibutuhkan pemimpin yang jujur. Selain itu bijaksana, bertanggung jawab dan mempunyai ilmu pengetahuan yang mumpuni sebagai seorang pemimpin. Bantuan pada program pemberdayaan pun disebutkan mempengaruhi partisipasi masyarakat. Apabila bantuan yang diberikan besar, maka partisipasi yang diberikan masyarakat pada pembangunan pun juga akan besar.

Berdasarkan beberapa kajian penelitian tersebut, terdapat perbedaan penelitian yang dilakukan peneliti, yaitu penggunaan perspektif teori. Dimana dalam penelitian ini, peneliti menggunakan perspektif yang dipaparkan oleh Max Weber dan Robert K. Merton. Weber dan Merton membagi pola kepemimpinan menjadi beberapa tipe. Tentunya dalam tipe – tipe tersebut, terdapat ciri – ciri yang membedakan antara otoritas satu dengan otoritas lainnya.

Penelitian ini mengkaji tentang bagaimana kepemimpinan dan legitimasi kepala desa dalam penyelenggaraan pembangunan. Serta respon masyarakat terhadap kepemimpinan kepala desa. Tujuan dari penelitian ini, untuk mengetahui kepemimpinan kepala desa

serta legitimasinya dalam penyelenggaraan pembangunan desa. Selain itu, penelitian ini dilakukan guna mengetahui respon masyarakat terhadap

kepemimpinan kepala desa dalam pembangunan di Desa Banaran Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun.

## **KAJIAN PUSTAKA**

### **Kepemimpinan**

Kepemimpinan merupakan sebuah keterampilan yang dimiliki oleh seseorang dalam suatu organisasi atau kelompok untuk menjadi pemimpin, pelopor, atau pembimbing orang lain. Sama halnya dengan John Piffner yang mengemukakan pendapatnya tentang kepemimpinan. Menurutnya, kepemimpinan adalah sebuah karya seni yang di dalamnya bisa mengarahkan atau menuntun individu dan kelompok agar dapat mencapai tujuan yang telah disepakati (H. Abu Ahmadi, 1999:124-125). Dengan tercapainya tujuan – tujuan tersebut, diharapkan bisa membawa kesejahteraan dan dampak yang baik bagi keberlangsungan hidup suatu anggota kelompok atau organisasi.

### **Kepemimpinan Kepala Desa dalam Perspektif Max Weber dan Robert K. Merton**

Weber dalam buku Teori Sosiologi karya George Ritzer dan Douglas J. Goodman, membagi otoritas menjadi 3

pola yaitu otoritas rasional legal, otoritas tradisional, serta otoritas karismatik. Weber menjelaskan mengenai struktur otoritas dalam sebuah tindakan sosial. Dimana dalam tindakan tersebut terdapat adanya dominasi yang dilakukan oleh pihak tertentu. Tujuannya agar dapat mempengaruhi pihak lain untuk menuruti keinginannya atau memenuhi otoritas yang coba dibangun oleh pihak tersebut.

Otoritas rasional legal menurut Max Weber, merupakan suatu otoritas yang berkembang dalam kehidupan masyarakat modern dan dibangun atas otoritas pihak penguasa atau pihak elit. Selanjutnya, otoritas tradisional menurut pandangan Max Weber menekankan keyakinan tradisi dalam menjalankan otoritasnya. Masyarakat percaya bahwa pemimpinnya saat ini merupakan pemimpinnya di masa lampau. Oleh sebab itu, otoritas ini berkembang pada masyarakat feodal yang masih berkeyakinan akan adat istiadat yang dimiliki kelompok atau organisasinya. Masyarakat pun tunduk oleh aturan yang

berlaku karena menganggap bahwa aturan tersebut sudah ada sejak dulu atau bersifat turun temurun. Selain itu, pada masyarakat dengan tipe otoritas tradisional ini tidak ada spesifikasi khusus akan keahlian atau kemampuan yang dimiliki. Otoritas karismatik menurut Weber, mengacu pada kualitas diri yang dimiliki oleh pemimpin. Sehingga dapat mengubah pola pikir, tindakan dan anggapan pada masyarakat tradisional. Dalam tipe ini, masyarakat lebih bersikap terbuka dalam menyelesaikan permasalahannya yang juga dibantu oleh kecakapan pemimpin dalam memimpin. Berbeda dengan tipe otoritas tradisional yang bersifat turun temurun. Tipe otoritas karismatik yang dimiliki pemimpin dapat hilang sewaktu – waktu dan mengakibatkan hilangnya rasa hormat yang sebelumnya dimiliki oleh masyarakat.

Menurut Robert K. Merton dalam buku Teori Sosiologi Modern yang ditulis oleh Bernard Raho, SVD, Merton membagi dua tipe kepemimpinan yaitu *Monoporphic Leadership* dan *Polymorphic Leadership*. *Monoporphic Leadership* merupakan tipe kepemimpinan yang pemimpinnya oleh masyarakat dianggap serba bisa di segala bidang. Tidak hanya melaksanakan tugas dan perannya saja

sebagai seorang pemimpin, tetapi juga melaksanakan tugas di bidang keagamaan, pertanian, dan lain – lain. Biasanya tipe kepemimpinan ini berkembang pada masyarakat lokal yang masih mempunyai sikap tertutup dan sulit untuk mengalami perubahan.

*Polymorphic Leadership* sendiri merupakan tipe kepemimpinan yang pemimpinnya hanya melaksanakan peran dan tugasnya, terbatas pada satu bidang saja. Artinya terdapat spesifikasi dalam pelaksanaan pekerjaannya. Biasanya tipe kepemimpinan ini berkembang pada masyarakat kosmopolitan yang mempunyai sifat terbuka dan mudah dalam mengalami perubahan.

### **Pembangunan Desa dalam Perspektif Teori**

Dalam buku Pembangunan di Negara Dunia Ketiga. Arif Budiman menjelaskan bahwa pembangunan secara umum merupakan suatu usaha yang dilakukan agar kesejahteraan masyarakat dapat tercapai secara maksimal. Perubahan yang terjadi pada masyarakat diharapkan dapat membawa keadaan yang lebih baik. Serta didasarkan pada nilai dan norma yang berkembang di masyarakat. Sama halnya dengan pembangunan yang

memiliki proses terarah dan terencana, sehingga dapat memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat menjadi lebih maju. (Minahasa, n.d.)

Arif budiman menyebutkan, kemajuan yang dimaksud untuk mensejahterakan masyarakat lebih difokuskan dalam hal material. Sebab ia menganggap bahwa aspek ekonomi sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh sebab itu, terdapat tingkat pengukuran pembangunan di suatu negara. Diantaranya kekayaan rata – rata, pemerataan agar masyarakat dapat menikmati haknya secara adil, kualitas kehidupan, kerusakan lingkungan, serta keadaan sosial dan kesinambungan.

### **Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan**

Dalam melakukan proses pembangunan, partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan. Partisipasi ini dapat berupa keikutsertaan masyarakat sebagai tenaga kerja dalam pembangunan, perencanaan pembangunan, dan lain – lain. Karena partisipasi merupakan keterlibatan, maka masyarakat dapat memberikan sumbangan pengetahuan atau pemikiran untuk mencapai tujuan yang telah

ditetapkan. Menurut Conyers (1994: 154), alasan partisipasi sangat penting dilakukan oleh masyarakat karena partisipasi merupakan alat untuk berkomunikasi antara masyarakat dengan pemerintahan. Melalui partisipasi dan keikutsertaan masyarakat dalam suatu program kerja atau pembangunan, akan meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan desa. Selain itu, jika masyarakat dilibatkan dalam program pembangunan pemerintah, maka hak demokrasi masyarakat akan terpenuhi dan masyarakat dapat memberikan pendapat dalam program tersebut.

### **METODE PENELITIAN**

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor (Moloeng 2007: 4). Penelitian kualitatif yaitu salah satu jenis penelitian yang mana dalam perolehan datanya bukan berupa angka – angka, melainkan menggunakan kata – kata tertulis atau lisan. Serta mengamati perilaku satu individu sesuai dengan realitas yang benar - benar sedang terjadi.

Penelitian ini dilakukan di Desa Banaran Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun. Selain karena kesesuaian antara tema atau topik yang diambil dengan realita

di lapangan. Dimana Desa Banaran dinilai lancar dalam melakukan pembangunan sarana dan prasarannya. Kepala desa juga dinilai bersih serta bersikap transparan dalam pemerintahannya. Hal tersebut meningkatkan kepercayaan masyarakat, sehingga masyarakat mendorong kepala desa untuk memimpin kembali selama tiga kali berturut – turut.

Subjek dalam penelitian ini kepala desa yang bernama Hariyono beserta 3 perangkat desa yang bernama Endah Sunaryati, Yulistiyani, dan Sujarwo, serta beberapa masyarakat desa. Kepala desa, perangkat desa, dan masyarakat merupakan satu kesatuan yang sangat penting dalam tatanan pemerintahan desa. Dalam menentukan subjek penelitian, peneliti menggunakan teknik *purposive sampling*. Menurut Sugiyono (2008:85), *purposive sampling* merupakan suatu teknik dalam menentukan subjek penelitian dengan melakukan beberapa pertimbangan tertentu. Dimana subjek tersebut dianggap paling tahu tentang masalah yang akan diteliti oleh peneliti. Karena peneliti mengambil topik penelitian tentang pembangunan dan kepemimpinan kepala desa, maka kepala desa, perangkat desa serta masyarakat dinilai sesuai sebagai subjek penelitian. Endah Sunaryati, Yulistiani, dan Sujarwo dianggap

lebih terbuka dalam memberikan penjelasan. Dengan adanya Pertimbangan tersebut diharapkan dapat membantu peneliti dalam melakukan penelitian dengan menjelajahi situasi sosial yang ada. Subjek penelitian yang dipilih merupakan orang – orang ahli yang mengerti di bidang pemerintahan desa. Oleh sebab itu, jawaban yang diberikan pun sesuai dengan penelitian yang diteliti, serta tidak keluar dari topik penelitian.

Penelitian ini menggunakan dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer merupakan jenis data yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan *participant observar*, wawancara mendalam (*in - dept interview*), dan dokumentasi. Data sekunder merupakan jenis data yang dikumpulkan oleh peneliti melalui sumber yang sebelumnya sudah ada. Studi pustaka adalah teknik pengumpulan data yang diperoleh melalui jenis data sekunder.

Peneliti melakukan pendekatan dengan perangkat desa dan kepala Desa Banaran melalui proses *getting in*. Pendekatan dilakukan agar peneliti bisa lebih dekat dengan perangkat desa serta masyarakat Desa Banaran. Dalam proses pendekatan tersebut, peneliti melakukan kegiatan magang atau PKL di Kantor

Kepala Desa Banaran selama satu bulan. Dalam proses ini, peneliti melakukan interaksi langsung kepada perangkat desa serta masyarakat yang membutuhkan bantuan. Dalam kegiatan magang tersebut peneliti ditempatkan pada bagian pelayanan, dengan maksud agar bisa langsung bertemu dengan masyarakat desa. Setelah kegiatan magang selesai, peneliti banyak melakukan konsultasi kepada salah satu perangkat desa yaitu Endah Sunaryati. Tujuannya adalah untuk mengetahui sedikit informasi mengenai perangkat dan kepala desa, serta keadaan Desa Banaran.

Dalam penelitian ini, peneliti menempatkan dirinya sebagai *participant observer*. Dimana keterlibatan serta kehadiran peneliti di lapangan lebih memungkinkan dalam mencari data dan makna atas respon yang dilakukan oleh subjek penelitian. Oleh sebab itu, peneliti harus bisa menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi di lapangan.

Kemudian peneliti melakukan kegiatan wawancara secara mendalam (*in - dept interview*) dengan pihak – pihak terkait tema/topik yang peneliti teliti. Pihak – pihak tersebut antara lain kepala desa, perangkat desa, dan masyarakat. Kegiatan wawancara tidak hanya dilakukan sekali saja, namun akan dilakukan secara

berulang. Tujuan dilakukan wawancara secara berulang agar informasi yang disampaikan oleh subjek penelitian bersifat spesifik dan mendalam. Wawancara secara mendalam merupakan salah satu metode dalam pengambilan data yang paling efektif, karena peneliti bisa langsung bertatap muka dengan subjek penelitian. Serta dapat secara langsung mendapatkan informasi terkait tema/topik penelitian. Oleh sebab itu, wawancara tidak bisa dilakukan hanya dengan satu kali pertemuan saja.

Selanjutnya adalah dokumentasi, dimana menurut Sugiyono (2009 : 240) dokumentasi merupakan sebuah catatan suatu kejadian atau peristiwa yang telah berlalu. Dokumentasi yang digunakan peneliti dalam penelitian ini yaitu berupa hasil rekaman suara maupun foto atau gambar - gambar dari subjek penelitian. Hal tersebut dilakukan agar memudahkan peneliti dalam menyusun laporan penelitian selanjutnya. Sedangkan untuk studi pustaka, dilakukan dengan cara mempelajari buku – buku referensi, laporan – laporan, jurnal – jurnal, maupun skripsi yang ada, baik secara *online* maupun *offline*. Selain itu, mempelajari jurnal penelitian terdahulu merupakan salah satu studi pustaka yang sangat

membantu peneliti dalam melakukan penelitian. Tidak hanya jurnal penelitian saja, berita online juga berperan untuk membandingkan realita yang terjadi di lokasi penelitian dengan daerah lainnya.

Penelitian ini mengadopsi analisis data Miles dan Huberman untuk menganalisis data. Miles dan Huberman (dalam Emzir, 2010 : 129) menyatakan langkah – langkah analisis data kualitatif, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Peneliti menuangkan data – data yang didapatkannya dari lapangan (lokasi penelitian) ke bentuk sebuah laporan. Data – data tersebut berasal dari kegiatan wawancara secara mendalam (*in – depth interview*) yang dilakukan peneliti dengan subjek penelitian. Kemudian, data tersebut direduksi dengan cara melakukan rangkuman/ringkasan. Dengan demikian, data yang telah direduksi tersebut dapat memberikan gambaran yang jelas, serta dapat membantu peneliti untuk melakukan langkah selanjutnya.

Penyajian data merupakan langkah selanjutnya setelah mereduksi data. Pada penyajian data, peneliti mencoba menampilkan berbagai data yang relevan. Sehingga data tersebut menjadi informasi yang memiliki makna tertentu dan dapat

disimpulkan. Biasanya penyajian data dilakukan dalam bentuk teks atau naratif. Setelah penyajian data selesai dilakukan, langkah terakhir yang peneliti lakukan adalah menarik kesimpulan. Kesimpulan yang dikemukakan tersebut didukung dengan bukti – bukti yang valid dan konsisten. Sehingga kesimpulan yang didapat bersifat kredibel.

## **PEMBAHASAN**

### **Pola Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Pembangunan**

Seringkali kepemimpinan dikaitkan dengan gaya bagaimana seseorang itu dalam memimpin. Begitupun dengan kepemimpinan yang dilakukan oleh kepala desa. Keberhasilan pembangunan juga bergantung dari bagaimana kepala desa dalam memimpin sesuai dengan peraturan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. (Dhiana Paramita, 2011)

Dalam Undang – Undang tersebut dijelaskan bahwa peran dan tugas kepala desa adalah:

1. Menyelenggarakan pemerintahan desa
2. Melaksanakan pembangunan desa
3. Pembinaan kemasyarakatan desa
4. Pemberdayaan masyarakat desa

Menurut masyarakat, sosok ideal seorang pemimpin dapat dilihat dalam beberapa hal, diantaranya mampu

mengayomi masyarakat, dapat bersikap adil, dapat diandalkan dan bisa menyelesaikan masalah dengan baik. Selain itu mempunyai wibawa yang kuat, serta dapat mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Sikap – sikap tersebut nyatanya dimiliki oleh kepala Desa Banaran, dimana masyarakat sendirilah yang menilai hal tersebut dan menciptakan suatu kepercayaan yang diyakini oleh masyarakat. Selain itu, untuk mendeskripsikan model kepemimpinan seorang pemimpin, dapat diketahui pula melalui kedekatannya dengan masyarakat. Kedekatan dengan masyarakat dapat dijabarkan menggunakan intensitas mendengarkan keluhan dan kemudahan untuk ditemui dan diajak berdiskusi. (Ardilah dkk., 2014)

Dalam menjalankan pemerintahan, otoritas seorang pemimpin dapat mempengaruhi pola kepemimpinannya. Jika dilihat pada perspektif Max Weber yang membagi otoritasnya dalam 3 bentuk, yaitu rasional legal, tradisional, dan karismatik. Pola kepemimpinannya cenderung mengarah ke otoritas rasional legal, dimana otoritas ini berkembang pada masyarakat modern. Pandangan mengenai masyarakat modern yang hanya berkembang pada masyarakat perkotaan

saja tidaklah relevan. Nyatanya pemimpin yang mampu menjalankan otoritas rasional legal dapat dijalankan di tingkat desa, seperti di Desa Banaran. Masyarakat modern memandang pemimpin dari segi impresi atau kesan, karena masyarakat modern memiliki standarisasi pemimpinnya sendiri. Begitupun dengan masyarakat Desa Banaran yang memiliki standarisasinya sendiri. Mereka akan lebih memperhatikan seorang pemimpin karena masyarakat sangat menghargai otoritas legal. Hal ini juga terkait dengan kesadaran politik kelompok masyarakat tersebut. Apabila suatu kelompok masyarakat memiliki kesadaran politik yang tinggi, maka mereka cenderung memandang kepemimpinan sebagai bagian dari proses sosial. Mereka lebih terbuka dengan perubahan namun juga lebih rasional dalam memandang suatu peristiwa.

Robert K. Merton membagi masyarakat ke dalam dua bentuk, yaitu masyarakat lokal dan masyarakat kosmopolitan. Masyarakat Desa Banaran dapat disebut sebagai masyarakat kosmopolitan karena memiliki sikap terbuka dan mampu menghadapi perubahan sosial. Sedangkan masyarakat lokal memiliki sikap tertutup sehingga perubahan sosial sulit untuk dilakukan.

Dalam masyarakat lokal, muncul tipe kepemimpinan yaitu *Monoporphic Leadership*. Tipe ini menganggap pemimpin serba bisa dan bertanggung jawab di segala bidang. Sedangkan pada masyarakat kosmopolitan muncul tipe kepemimpinan yaitu *Polyporphic Leadership*, dimana pemimpin hanya bertanggung jawab di satu bidang saja sesuai tugas dan perannya sebagai pemimpin.

Selain dipandang sebagai masyarakat kosmopolitan, pemimpin di Desa Banaran lebih dipandang sebagai tipe kepemimpinan *polymorphic leadership* yang memiliki nilai profesionalitas. Karena antara masyarakat kosmopolitan dan kepemimpinan dengan tipe *Polyporphic Leadership* saling berkaitan. Nilai profesionalitas pada pemimpin dengan tipe *Polyporphic Leadership*, artinya seorang pemimpin bukan sosok yang bisa diberikan tanggungjawab atas segala urusan. Ia memiliki spesialisasi menangani bagian pemerintahan. Kesadaran ini membuat warga turut memperhatikan hak maupun tanggung jawabnya sebagai anggota masyarakat. Kesadaran ini dapat dilihat melalui tingkat partisipasi dalam perumusan dan pelaksanaan baik program kerja maupun kebijakan. Keputusan-

keputusan pemimpin, tidak hanya sebagai *taken for granted*. Keputusan-keputusan merupakan hasil dari proses musyawarah mufakat.

### **Legitimasi Kepemimpinan Kepala Desa**

Seorang pemimpin disebut berhasil salah satunya karena telah diterima oleh masyarakat. Kepala desa sebagai pemimpin memerlukan legitimasi untuk mendukung program – program yang telah direncanakan agar terlaksana dengan baik. Terkait dengan keberhasilan kepala desa dalam membuat program – program kerja yang disukai oleh masyarakat, terdapat beberapa cara kepala desa dalam mempersuasi agar setiap orang mendukungnya. Salah satunya dengan kejelasan visi dan misi yang disampaikan oleh kepala desa. Legitimasi tersebut juga dapat dilihat melalui persetujuan atau tanggapan masyarakat mengenai program kerja yang telah terlaksana. Penerimaan keputusan kepala desa oleh warganya, dan diterimanya pemimpin dengan adanya umpan balik yang dimanifestasikan dalam sebuah ruang opini. (Arumsari dkk., 2017)

Berdasarkan penuturan subjek, program kerja yang paling disukai oleh masyarakat Desa Banaran adalah bank sampah dan pavingisasi. Bank sampah

mendapatkan respon yang baik dikarenakan masyarakat merasakan secara langsung manfaatnya. Manfaat tersebut berupa hasil uang, meskipun hanya dengan mengumpulkan sampah dari rumah tangga. Sedangkan pavingisasi merupakan salah satu contoh faktor keberhasilan dari kepemimpinan kepala desa. Apabila dilihat dari proses pelaksanaan pembangunannya yang melibatkan warga.

Legitimasi jika dilihat dari penerimaan keputusan kepala desa oleh warganya, dapat ditandai melalui penolakan dan ketidaksetujuan atas kebijakan. Hal ini dapat menjadi bentuk kurangnya legitimasi pemimpin yang di sisi lain dapat mendandakan penerimaan yang baik jika penyampaiannya pun juga baik. Sehingga dapat menemukan jalan keluar bersama. Namun menurut subjek, baik itu perangkat desa maupun masyarakat, belum pernah merasakan ketidaksetujuan atas kebijakan kepala desa.

Sebelum sebuah kesepakatan disahkan atau disepakati, diadakan kegiatan rapat untuk mensosialisasikan rancangan keputusan kepada masyarakat. Rapat tersebut secara lebih lanjut

menciptakan ruang opini antar kepala desa, perangkat dan masyarakat. Oleh sebab itu, setiap keputusan kebijakan kepala desa jarang ditanggihkan oleh masyarakat.

Terdapat beberapa mekanisme dalam menyampaikan pendapat atau ruang – ruang opini yang ada di Desa Banaran. Mekanisme formal adalah melalui ketua RT, yang kemudian disampaikan kepada kepala dusun. Selain itu, penyampaian pendapat juga dapat disampaikan kepada anggota BPD (Badan Permusyawaratan Desa). Semua mekanisme tersebut nantinya akan bermuara ke kepala desa. Artinya setiap kritik atau masukan dari warga akan ditampung dan disampaikan kepada kepala desa saat kegiatan musrenbang. (Suroso dkk., 2014)

Tabel 1. Pembangunan Di Desa Banaran Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun

No.	Pembangunan	Selesai	Belum
-----	-------------	---------	-------

1.	Pembangunan Drainase	✓	-
2.	Pos Kamling	✓	-
3.	Talang Air	-	✓
4.	TPT (Tembok Penahan Tanah)	✓	-
5.	RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	✓	-
6.	Bank Sampah	✓	-
7.	Lampu Jalan	-	✓
8.	Perbaikan masjid	✓	-
9.	Jalan Desa (Paving)	✓	-
10.	Pengadaan Air Bersih (Sumur Sibel)	✓	-
11.	Renovasi Gedung PAUD	✓	-

Sumber : Data Profil Desa Banaran Tahun 2019

Berdasarkan data diatas, terdapat beberapa pembangunan di Desa Banaran Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun pada tahun 2019. Pembangunan tersebut antara lain, pembangunan drainase, pos kamling, talang air, TPT (Tembok Penahan Tanah), RTLH (Rumah Tidak Layak Huni), bank sampah, lampu jalan, perbaikan masjid, jalan desa (paving), pengadaan air bersih (sumur sibel), dan renovasi gedung

PAUD. Namun diantara pembangunan – pembangunan yang direncanakan, masih terdapat dua pembangunan yang masih belum terlaksana karena keterbatasan sumber daya. Baik tenaga kerja maupun sumber dana. Pembangunan tersebut adalah talang air dan lampu jalan. Diperkirakan pembangunan tersebut akan selesai pada tahun 2020, jika aliran dana desa berjalan lancar.

Tabel 2. Realisasi Sarana dan Prasarana Kegiatan Fisik Tahun. 2019

No.	Jenis Prasarana	Lokasi	Volume	Tanggal Pelaksanaan	Jumlah Pekerja	RTM	Anggaran Kegiatan	Sumber Dana
-----	-----------------	--------	--------	---------------------	----------------	-----	-------------------	-------------

1.	Saluran Drainase	RT 02 RW 01	66 m	18 Maret - 9 April	9	9	40,000,000	DD
2.	Saluran Drainase	RT 03 RW 01	191 m	20 Mei - 15 Juni	12	12	127,500,000	DD
3.	Paving	Punden Banaran	168 m <sup>2</sup>	26 April - 25 Mei	6	6	24,970,500	DD
4.	Paving Jalan	Jalan Poros Dusun Banaran	260 m X 3.2 m	12 Agustus - 9 Nopember	17	17	175,000,000	BKK
5.	Saluran Drainase	RT 04 RW 01	76 m	8 Juni - 29 Juni	9	9	50,000,000	BKK
6.	Saluran TPT	RT 04 RW 01	181 m	22 Juni - 16 Agustus	10	10	50,000,000	BKK
7.	Saluran Drainase	RT 05 & 06	178 m	26 Agustus - 5 Oktober	14	14	119,500,000	DD
8.	Saluran Drainase	RT 06 & 07	181 m	3 Juni - 24 Agustus	12	12	120,300,000	DD
9.	Saluran TPT	Jalan Poros Kedunguni	180 m	20 Mei - 1 Juni	10	10	54,300,000	DD
10.	Paving	Punden Kedunguni	392 m <sup>2</sup>	1 April - 11 Mei	9	9	58,600,000	DD
11.	Bank Sampah	RT 05 RW 02	5 X 7 m	14 Oktober - 26 Oktober	9	9	77,750,000	DD & ADD
12.	Plapon Masjid	Masjid Darul Izzah		29 Juli - 10 Agustus	4	4	15,891,000	BHP
13.	Renovasi Gedung PAUD	Gedung Paud		26 Agustus - 7 September	8	8	40,000,000	DD
14.	Pos Kampling	RT 02 dan RT 06	2 Unit	25 Agustus - 31 Agustus	7	7	30,000,000	DD
15.	RTLH	RT 06 RW 02	2 Unit	2 April - 28 April	8	8	20,000,000	ADD

Sumber :Realisasi Sarana Dan Prasarana Kegiatan Fisik Ta. 2019 Desa Banaran Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun

Berdasarkan data diatas, diketahui bahwa realisasi sarana dan prasarana kegiatan fisik yang dilakukan oleh pemerintahan desa pada tahun 2019 adalah

pembangunan saluran drainase, paving jalan, saluran TPT, bank sampah, plafon masjid, renovasi gedung PAUD, pos kamling, dan RTLH (Rumah Tidak Layak Huni).

Pembangunan saluran drainase sendiri dilakukan di beberapa lokasi Desa Banaran, yang meliputi RT. 02, 03, 04, 05, 06 dan 07, dengan volume masing – masing lokasi 66 m, 191 m, 76 m, 178 m, dan 181 m. Paving jalan dilakukan di tiga lokasi, yaitu punden Banaran, jalan poros Dusun Banaran, dan punden Kedunguni, dengan masing – masing volume 168 m<sup>2</sup>, 260 m x 3.2 m, dan 392 m<sup>2</sup>. Saluran TPT dilakukan di dua lokasi yaitu di RT. 04 RW 01 dan jalan poros Kedunguni dengan masing – masing volume 181 m dan 180 m. Pembangunan bank sampah dilakukan di lokasi RT. 05 RW. 02 dengan volume 5 x 7 m serta dana 77.750.000. Pembangunan plafon masjid dilakukan di Masjid Darul

### **Respon dan Partisipasi Masyarakat**

Menurut Tov dan Diener (2009), *“conceptions of happiness may vary across different societies, a number of questions arises regarding how culture influences the idea and experience of happiness.”* (Ia mengatakan bahwa konsep kebahagiaan mungkin beragam lintas kelompok masyarakat, yang kemudian memunculkan berbagai pertanyaan mengenai bagaimana kebudayaan mempengaruhi gagasan dan pengalaman tentang kebahagiaan.) Kemudian Tov dan Diener menerangkan

Izzah yang berlokasi di Dusun Kedunguni dengan dana sebesar 15.891.000. Renovasi gedung PAUD berlokasi di Dusun Banaran dengan sumber dana berasal dari dana desa sebesar 40.000.000. Pembangunan 2 unit pos kamling yang dilakukan di RT. 02 dan RT. 06 dengan sumber dana berasal dari dana desa sebesar 30.000.000. Terakhir bantuan pembangunan RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) yang dilakukan di RT.06 RW. 02 sebanyak 2 unit dengan dana sebesar 20.000.000. Dana tersebut berasal dari anggaran dana desa. Sebagian besar dana yang dikeluarkan untuk pembangunan sarana dan prasarana di Desa Banaran berasal dari dana desa dan anggaran dana desa.

bahwa penilaian kepuasan tidak selalu bisa menggunakan indikator yang sama. Penilaian tingkat kepuasan harus memperhatikan kebiasaan dan budaya kelompok masyarakat tersebut. Suatu kelompok masyarakat dapat menggunakan indikator bahan genting rumah atau lantai sebagai indikator kesejahteraan. Namun dalam kelompok masyarakat lain hal ini belum tentu bisa digunakan. Seperti lingkungan pelosok pedesaan dan orang-orang yang tinggal di hutan. Perlu indikator alternatif untuk menjadi

standarnya. Penjelasan tersebut mengemukakan mengenai hubungan antara kebudayaan dan kesejahteraan.

Respon masyarakat terhadap pemimpinnya tergambar dari seberapa puas mereka terhadap pemerintahannya. Kepuasan yang dimaksud adalah *self satisfaction* (kepuasan pribadi) warga yang selalu dilibatkan dalam beberapa program kerja desa. Tentu saja hal ini bersifat subjektif karena berasal dari pendapat individu masing - masing. Namun, perlu digaris bawahi bahwa masyarakat merupakan komponen penting dalam struktur pemerintahan. Bentuk *self satisfaction* (kepuasan pribadi) diwujudkan masyarakat dalam dukungannya terhadap

berbagai program kerja yang dicanangkan di Desa. Selain itu *self satisfaction* merupakan salah satu indikator *subjective well-being* yang memiliki kedudukan penting dalam penilaian keberhasilan pembangunan.

Oleh karena itu, tingkat kepuasan mereka salah satunya diwujudkan dalam bentuk dukungan terhadap program kerja kepala desa. Dukungan ini dapat dilihat melalui tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaannya. Tingkat partisipasi warga mencapai 90 persen. Persentase ini adalah persentase rata-rata partisipasi warga. Kepuasan ini tentu hasil dari hubungan kausalitas karena kepala desa selalu melibatkan warga secara langsung.

Tabel 3. Hasil Wawancara

No.	Nama	Sosok Ideal Pemimpin dan Kepemimpinannya	Legitimasi Pemimpin Terkait Penerimaan dan Penolakan Keputusan	Tingkat Partisipasi Masyarakat
1.	HR (Kepala Desa)	menjalankan tugas sesuai dengan peraturan yang ada dan mampu memberikan contoh yang baik kepada masyarakat	Kejelasan visi dan misi yang disampaikan sehingga masyarakat menerima dan menyetujui segala kebijakan	Respon masyarakat selama kepala desa menjabat sangat baik. Tingkat partisipasinya lebih dari 85 persen. Masyarakat selalu mendukung pembangunan desa

2.	JR (Perangkat Desa)	Dapat menyelesaikan segala permasalahan dengan sabar dan kepala dingin	Selama ini tidak ada kasus penolakan, karena segala kebijakan harus dimusyawarahkan dulu bersama masyarakat. Kepemimpinan kepala desa bersifat transparan	Lebih dari 80 persen masyarakat ikut serta. Responnya pun selalu baik, dibuktikan dengan kehadiran masyarakat
3.	ES (Perangkat Desa)	tidak mementingkan kepentingan pribadi dan selalu mementingkan kepentingan rakyatnya	Menerima segala keputusan, dengan catatan tidak menyimpang dari aturan melalui kegiatan musyawarah	Tingkat partisipasi masyarakat dalam berbagai program desa mencapai 90 persen, terutama dalam kegiatan bank sampah dan pembangunan desa
4.	YL (Ketua PKK)	bijaksana	Legitimasi terlihat dari pembuktian pembangunan dan program kerja yang diikuti masyarakat	Dalam kegiatan musyawarah, tingkat kehadiran masyarakat mencapai 75 persen. Sedangkan untuk kegiatan program kerja desa, seperti bank sampah, pembangunan jalan, dll tingkat partisipasinya lebih dari 80 persen
5.	RS (Warga)	Bisa mengayomi, memeluk dan sanggup menampung segala aspirasi masyarakat	Selama itu untuk kepentingan masyarakat tidak ada penolakan misalnya pembangunan jalan.	Tingkat partisipasi masyarakat dalam berbagai program desa cukup tinggi. Responnya juga baik terutama dalam kegiatan – kegiatan PKK.
6.	SL (Warga)	Pemimpin yang dapat bersikap adil ke semua	Menerima karena ada beberapa program	Karena dalam setiap program kerja desa

		kalangan	kerja yang disukai masyarakat misalnya bank sampah.	selalu melibatkan masyarakat, maka tingkat partisipasi dan keikutsertaannya pun juga cukup tinggi. Misal pembangunan paving jalan yang hanya mengambil tenaga kerja dari masyarakat Desa
--	--	----------	---	--

## PENUTUP

Dalam menentukan sosok pemimpin yang ideal, masyarakat memiliki standarisasinya masing – masing. Begitupun dengan masyarakat di Desa Banaran Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun. Kepala Desa Banaran memiliki model kepemimpinan transformasional, dimana kepemimpinan ini menekankan pada perhatian, komunikasi, kepercayaan, rasa hormat, dan resiko. Hal tersebut dibuktikan dalam setiap program kerja yang dilakukan selalu melibatkan masyarakat desa. Selain itu, berdasarkan perspektif yang dikemukakan Max Weber, kepala desa dinilai memiliki otoritas rasional legal karena masyarakat memandang pemimpin dari segi impresi atau kesan yang didapatkan.

Berdasarkan perspektif yang dikemukakan Robert K. Merton, model

Kepemimpinan kepala desa memiliki kecenderungan *polymorphic leadership* karena ia memiliki batasan-batasan yang jelas mengenai wewenang dan otoritas. Selain itu, kepala desa tidak bertanggung jawab di segala urusan, melainkan hanya bertanggung jawab di satu bidang.

Cara kepala desa dalam membangun legitimasi pun dengan meminimalisir adanya defisit kepercayaan. Ia melakukannya dengan membangun prestasi sebanyak-banyaknya untuk memperoleh pengakuan dari masyarakat, termasuk dalam mempersuasi masyarakat agar menerima segala kebijakan dari kepala desa melalui visi dan misi.

Hasil pemerintahan kepala desa terlihat ketika masyarakat puas memiliki pemimpin seperti dirinya. Kepuasan ini diwujudkan dalam bentuk respon baik dan antusiasme masyarakat untuk terlibat

melaksanakan program kerja kepala desa, misalnya dalam kegiatan Musrenbang, tenaga kerja pembangunan desa, dan berbagai program kerja desa lain.

## DAFTAR PUSTAKA

Ardilah, T., Makmur, M., Hanafi, I., Ilmu, J., Publik, A., Administrasi, F. I., & Brawijaya, U. (2014). Upaya Kepala Desa untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa (Studi di Desa Bareng Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang). *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 2(1), 71–77.

Arumsari, N., Septina, W. E., Luthfi, M., & Rizki, N. K. A. (2017). Komunikasi Politik Kepala Desa dalam Mendorong Inovasi Pembangunan Desa: Studi Kasus Tiga Desa di Lereng Gunung Ungaran, Jawa Tengah. *Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review*, 2(1), 86. <https://doi.org/10.15294/jpi.v2i1.8488>

Budiman, Arif. 2000. Teori Pembangunan Dunia Ketiga. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama

Chabib Suraya, M. (2017). Partisipasi Masyarakat Desa Kayulemah Dalam Pembangunan Pasca Penerapan Undang-Undang Desa. *Paradigma*, 5(3).

Dhiana Paramita, P. (2011). Gaya Kepemimpinan (Style Of Leadership ) Yang Efektif Dalam Suatu Organisasi

Patricia Dhiana Paramita) Abstraksi. *Jurnal*, 9, 7.

George Ritzer, dan Douglas J. Goodman.

2014. Teori Sosiologi. Bantul : Kreasi Wacana

Minahasa, M. K. (n.d.). *Pembangunan Di Desa Tateli Satu Kecamatan*.

Republik Indonesia.Undang – Undang No. 25 Tahun 2004

Republik Indonesia.Undang – Undang No. 6 Tahun 2014

Suroso, H., Hakim, A., & Noor, I. (2014). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Di Desa Banjaran Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik. *Wacana Journal of Social and Humanity Studies*, 17(1), 7–15.

<https://wacana.ub.ac.id/index.php/wacana/article/view/290>